



Judul : Harga Komoditas Tergantung Dunia: RI Punya Tambang Besar
Tanggal : Sabtu, 01 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

RI Punya Tambang Besar Harga Komoditas Tergantung Dunia

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengungkapkan, sudah seharusnya Indonesia memiliki indeks komoditas nasional dan sistem perdagangan yang efisien dan transparan. Supaya Indonesia punya kesempatan mengontrol harga dan volume perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional.

“Indeks komoditas nasional real time ini akan menjadi acuan harga pasar dunia. Hal itu sangat dibutuhkan agar posisi Indonesia menjadi lebih kuat sebagai price maker dunia yang juga bisa mengontrol volume serta harga komoditas,” ujar Aria Bima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komoditas dengan ekonom Faisal Basri di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Diketahui, Indonesia memiliki komoditas unggulan dalam jumlah besar yang sangat diminati pasar internasional seperti batu bara, bauksit, timah, nikel, CPO, Kakao, tembaga, tembakau, kopi, teh, dan lainnya. Namun Indonesia sebagai produsen bukanlah penentu harga komoditas tersebut, tetapi tergantung pada harga pasar dunia sehingga hasil ekspor tersebut tidak memberikan pendapatan yang maksimal.

Adapun indeks harga nikel timah bauksit selama ini mengikuti indeks harga dari London Meta Exchange. Begitu pula dengan harga kakao dan kopi mengikuti indeks harga dari New York dan London. Sementara itu CPO tembakau ditentukan oleh Rotterdam dan Malaysia.

Oleh karena itu, Komisi VI membentuk Panja (Panitia Kerja) Komoditas. Panja inilah yang akan terus menggali, ingin mendapatkan masukan dari para pakar dan berbagai elemen lainnya. Sehingga ke depan memungkinkan Indo-

nesia memiliki indeks komoditas nasional dengan sistem perdagangan yang efisien dan transparan.

“Panja ini berharap untuk menghidupkan sistem resi gudang. Ini yang dapat ditukar di lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, menghidupkan sistem pembayaran countertrade (barter),” ungkapnya.

Selain itu, tujuan lainnya adalah mencermati efektivitas undang-undang yang terkait. Berikutnya, mengatasi ketidakpastian informasi permintaan dan penawaran yang tidak jelas, terutama saat terjadi fluktuasi harga CPO maupun batubara masa pandemi.

Sejauh ini, lanjutnya, Komisi VI telah mengundang Profesor Bustanul Arifin, tokoh senior dari perdagangan Pak Ardiansyah. “Tapi sampai hari ini kita juga belum yakin, belum mendapatkan kerangka pemikiran, struktur berpikir seperti apa indeks harga komoditas yang terbaik,” ucapnya.

Anggota Komisi VI Siti Mukaromah menambahkan, Panja Komoditas dibentuk dengan harapan dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk perbaikan komoditas di Indonesia. Kita memiliki banyak potensi luar biasa, namun masih memiliki banyak persoalan berkaitan dengan hal tersebut.

“Indonesia dari darat, udara, laut, sampai ke bawah bumi punya potensi luar biasa. Akan tetapi kita juga punya persoalan luar biasa berkaitan dengan komoditas dan potensi-potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini tidak hanya komoditas baru yang mengalami kesulitan, tetapi komoditas lama seperti kelapa sawit, batu bara, nikel dan sebagainya. Harga komoditas-komoditas tersebut dinilai masih belum berpihak pada masyarakat. ■ KAL